

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2018**



KATA PENGANTAR

Program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera untuk itu dalam rangka program yang diantarkan diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999.

Untuk melaksanakan maksud tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah dari pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban ini disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, maka Kepala Dinas Perikanan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan.

Laporan ini merupakan sesuatu yang masih baru dilingkungan pemerintahan sehingga kesempurnaan dan keakuratannya masih jauh dari yang diharapkan. Saran dan kritik dari semua pihak mutlak diperlukan untuk menyempurnakan laporan ini pada masa yang akan datang.

Sekayu, Januari 2019

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. ABDUL MUKOHIR, A.Pi.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640410 198903 1 008**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Isu Strategis.....	7
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP.....	7
D. Sistematika Penyajian	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Rencana Strategis dan indikator Kinerja Utama.....	10
B. Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan	11
C. Program dan Kegiatan Pokok	14
D. Indikator Kinerja Utama.....	16
E. Rencana Kerja.....	17
F. Penetapan Kinerja Tahun 2018.....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	18
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
C. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	22
D. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	24
E. Analisis Atas Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan atas Pencapaian Kinerja.....	26
F. Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV. PENUTUP	
A. Penutup.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	12
Tabel 2. Sasaran Renstra dan Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 3. Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan.....	20
Tabel 4. Indikator Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Produk Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan.....	21
Tabel 5. Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Ikan, Terjaganya Kelestarian Ikan dan Terjaganya Ekosistem Reservaat.....	21
Tabel 6. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun lalu dan Beberapa tahun Terakhir	21
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan target Akhir Renstra tahun 2022	22
Tabel 8. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Terhadap Setiap Sasaran	24
Tabel 9. Akuntabilitas Keuangan Dinas Perikanan.....	27

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik ditunjukkan dari pelaksanaan kegiatan yang baik dan sesuai dengan perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran yang tertib, dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil dan bertanggung jawab merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

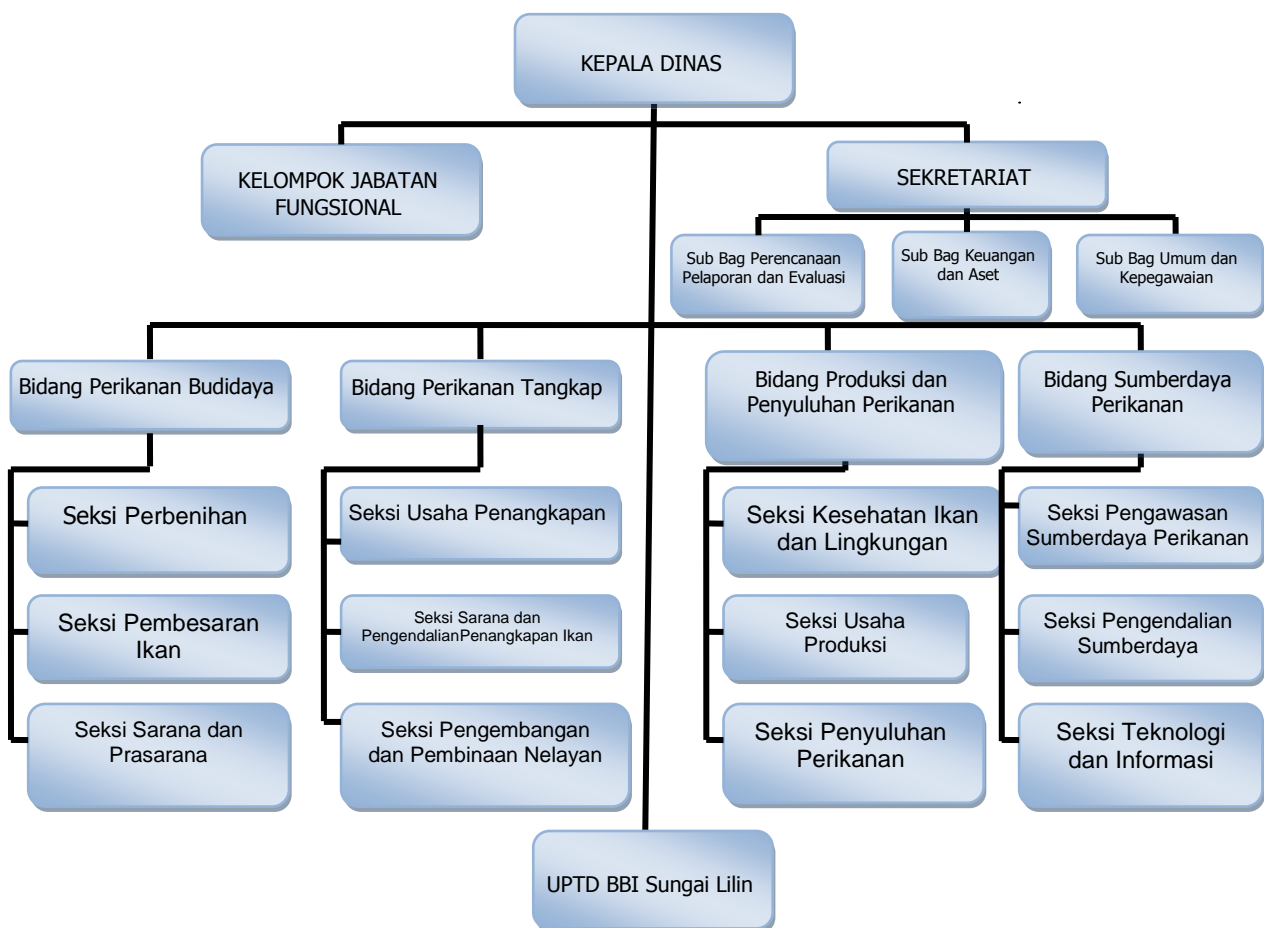
Penyusunan LkjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan dalam pencapaian target kinerja tahun 2018. Serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) di masa yang akan datang.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

Dinas Perikanan mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah dibidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Produksi dan Penyuluhan Perikanan, dan Sumberdaya Perikanan, sesuai dengan Kewenangan dan tugas lain yang dilimpahkan Bupati. Struktur Organisasi Dinas Perikanan lebih jelas dapat dilihat pada bagan seperti tertera pada Gambar 1.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat orang Kepala Bidang yang masing-masing mengepalai Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Produksi dan Penyuluhan Perikanan, dan Sumberdaya Perikanan. Disamping itu terdapat tiga Kasubbag dan dua belas Kepala Seksi, sedangkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas di Kecamatan maka Kepala Dinas mengangkat seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk di BBI Sungai Lilin. Struktur organisasi Dinas Perikanan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 71 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan
 2. Seksi Pembesaran Ikan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Perikanan Tangkap
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nelayan
- e. Bidang Usaha Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha
 2. Seksi Data Usaha Perikanan
 3. Seksi Promosi Sektor Perikanan
- f. Bidang Sumberdaya Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Potensi Sumberdaya Perikanan
 2. Seksi Pengendalian Sumberdaya Ikan
 3. Seksi Informasi dan Teknologi Perikanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Sungai Lilin,
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin akhir tahun 2018 dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 37 orang.

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

Golongan IV : 9 orang

Golongan III : 22 orang

Golongan II : 6 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

SLTA : 4 orang

DIV/S1 : 12 orang

S2 : 21 orang

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) serta Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, maka Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur organisasi, Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perikanan atas pelaksanaannya, melaksanakan segala urusan dibidang perikanan, melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam

lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi serta instansi terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan;
- c. Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perikanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Perikanan;
- f. Monitor dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- g. Penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.2 Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang perikanan serta tugas pembantuan di bidang perikanan
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang perikanan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang perikanan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas perikanan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang perikanan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas perikanan;
- g. Pengelolaan dibagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan, Keuangan dan BMD serta Umum dan Kepegawaian di lingkungan dinas perikanan;
- h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang perikanan;
- i. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- j. Pengelolaan aset barang milik daerah di lingkungan dinas perikanan; dan
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas perikanan;

2.3 Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang budidaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya;
- b. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan produktivitas di bidang budidaya;
- c. Penyusunan bahan penetapan sasaran perbenihan dan pembesaran ikan;
- d. Penyusunan bahan penerbitan sertifikasi pembenih dan pembudidaya;
- e. Pelaksanaan pembinaan pada Balai Benih Ikan, UPR, dan *Hatchery*; dan

f. Pelaporan pelaksanaan pengawasan terhadap pakan buatan dan alami di bidang budidaya;

2.4 Bidang Perikanan Tangkap.

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, usaha penangkapan ikan, sarana penangkapan ikan, pengembangan dan pembinaan nelayan;.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam wilayah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyusunan program pengembangan usaha kegiatan pemberdayaan nelayan kecil;
- c. Penyusunan penetapan estimasi jumlah kebutuhan ikan dan sasaran penebaran benih ikan di perairan umum daratan;
- d. Penyusunan data rencana pengembangan pembinaan usaha nelayan kecil dan pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- e. Penyusunan dan pengembangan perikanan tangkap, pembinaan nelayan;
- f. Penyusunan bahan pengelolaan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di kegiatan lelang lebak lebung; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan di bidang penangkapan ikan;

2.5 Bidang Usaha Perikanan.

Bidang Usaha Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan dan promosi sektor perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan dan promosi sektor perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan dan promosi sektor perikanan;
- c. Penyusunan bahan penetapan sasaran produksi perikanan dari hasil budidaya dan produk olahan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk dan pengembangan produksi serta peningkatan produktivitas;
- e. Penyusunan bahan pembinaan bidang pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan dan promosi sektor perikanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan dan promosi sektor perikanan di bidang penyuluhan;
- g. Pelaporan pelaksanaan di bidang usaha perikanan;

2.6 Bidang Sumberdaya Perikanan.

Bidang Sumberdaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumberdaya perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumberdaya perikanan;
- b. Penyusunan bahan pembinaan penetapan sasaran dibidang sumberdaya perikanan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan teknologi dan informasi di bidang sumberdaya pada masyarakat;
- d. Penyusunan bahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan dibidang sumberdaya;
- e. Penyusunan bahan perumusan tata operasional pengawasan, penegakan hukum, sarana dan prasarana serta pembinaan kepada masyarakat sumberdaya perikanan;
- f. Penyusunan bahan inventarisasi, penyusunan rencana dan pengembangan;

2.7 UPTD Balai Benih Ikan Sungai Lilin.

UPTD Balai Benih Ikan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menghasilkan benih dan calon induk yang berkualitas;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan balai benih ikan;
- d. Melakukan pembinaan kepada UPR (Unit pembenihan rakyat) untuk mendapatkan benih unggul;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan produksi benih;
- f. Melakukan restocking ikan hasil pembenihan dan memberikan bantuan kepada pembudidaya;
- g. Melakukan pengembangan pembenihan untuk jenis ikan lokal;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Membantu pengawasan pemeliharaan dan Pembangunan sarana prasarana perikanan pada Balai Benih Ikan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

B. Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat serta kemudahan untuk dikelola.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022, Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) dibuat dalam rangka perwujudan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Perikanan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Oleh karenanya diharapkan secara terus menerus mendorong perbaikan proses manajemen dan kompetensi aparat dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Latar belakang, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP, Serta Sistematika Penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini, Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Target Jangka Menengah, Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, Realisasi Anggaran.

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran Rencana Strategis (RS)
- Lampiran Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2018
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2017–2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Visi – Misi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin :

Dinas Perikanan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mengurus urusan pilihan dibidang perikanan, dan berperan aktif dalam pembangunan dibidang perikanan. Serta berperan aktif dalam pelestarian lingkungan perairan secara umum. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Dinas Perikanan merumuskan Visi Dinas Perikanan yaitu “**Masyarakat Perikanan Tangguh 2022**”

Fungsi pelayanan yang dilakukan Dinas perikanan dalam bentuk pelayananan langsung maupun tidak langsung. Pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan melayani konsultasi masyarakat perikanan dalam rangka pembudidayaan, penangkapan, pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan lingkungan perikanan. Serta mewujudkan pengawasan dilingkungan perairan umum dengan memberdayakan masyarakat perikanan itu sendiri.

Untuk maksud di atas dibutuhkan lembaga profesional dalam perencanaan Pembangunan artinya mampu merumuskan kebijakan perencanaan yang *applicable*, tepat guna dan tepat sasaran yang didukung oleh aparatur perencana yang berkualitas, memiliki keterampilan yang tinggi, berwawasan luas, bertanggungjawab, aspiratif mampu bekerja keras dan berdisiplin

tinggi. Perencanaan terpadu yang berkualitas mengandung arti terintegrasinya antar sektor dan antar lembaga dalam proses perencanaan dan pembangunan serta melibatkan semua pelaku pembangunan yaitu pihak swasta, komponen masyarakat secara aktif dan positif. Sedangkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, dimana rencana anggaran disusun secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan, dikendalikan dengan tepat guna dan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan.

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan dirumuskan 2 (dua) misi yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian Ekonomi, pemberdayaan masyarakat perikanan dan penanggulangan kemiskinan.
2. Mengelola Sumber Daya Alam secara Optimal dan Bertanggung jawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (*Green Growth Governance*).

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas perikanan sebagai Perangkat Daerah yang mengurus urusan pilihan dibidang perikanan, dan berperan serta dan aktif dalam pembangunan dibidang perikanan. Serta berperan aktif dalam pelestarian lingkungan perairan secara umum. Dalam mewujudkan tujuan tersebut dinas perikanan merumuskan Tujuan Dinas Perikanan yaitu:

- a. Meningkatkan produksi perikanan dan pengembangan perikanan dengan meningkatkan sarana prasarana perikanan
- b. Peningkatan diversifikasi olahan, peningkatan angka konsumsi ikan dan meningkatnya investasi di sektor perikanan
- c. Meningkatkan kelestarian sumberdaya perikanan

Sasaran jangka menengah dari Dinas Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perikanan
3. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan nelayan
4. Meningkatnya pelaku usaha perikanan
5. Meningkatnya diversifikasi produk perikanan dan angka konsumsi ikan
6. Meningkatnya kelestarian ekosistem sumberdaya perikanan

B. Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang cukup relevan, cepat, tepat dan akurat serta analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Muba Maju Berjaya 2022		
Misi 1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi, pemberdayaan masyarakat perikanan dan penanggulangan kemiskinan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan produksi budidaya dengan pemberdayaan dan pengembangan pembudidaya serta meningkatkan sarana prasarana perikanan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan 2. Meningkatnya Produksi Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya 2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya 3. Meningkatkan Pendampingan Masyarakat Perikanan Budidaya 4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 5. Menyediakan pakan alami yang berkelanjutan dan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 6. Pengembangan Kawasan budidaya air tawar dan air payau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pakan alami yang berkelanjutan, Penanganan Hama dan Penyakit Ikan dengan melakukan monitoring dan pembuatan laboratorium 2. Mengembangkan kawasan-kawasan potensial budidaya air tawar dan air payau 3. Peningkatan Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Masyarakat Perikanan Budidaya
1. Peningkatan diversifikasi olahan, optimalisasi pemasaran hasil perikanan, peningkatan angka konsumsi ikan dan meningkatnya investasi di sektor perikanan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelaku usaha perikanan 2. Meningkatnya diversifikasi produk perikanan dan angka konsumsi ikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah diversifikasi produk perikanan 2. Meningkatkan angka konsumsi ikan 2. Meningkatkan pelaku usaha perikanan 3. Meningkatkan produksi olahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Masyarakat Pengolahan Perikanan serta penambahan Sumber Daya Manusia 2. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan
Misi 2	Mengelola Sumber Daya Alam secara Optimal dan Bertanggung jawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (<i>Green Growth Governance</i>).		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

1. Meningkatkan kelestarian sumberdaya perikanan dan penerapan teknologi dan informasi perikanan	1. Meningkatkan kelestarian ekosistem sumberdaya perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Perikanan 3. Peningkatan Identifikasi keanekaragaman ikan di lokasi suaka 4. Pembinaan <i>Illegal Fishing</i> 5. Peningkatan Wawasan masyarakat tentang undang-undang perikanan 6. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Perairan Umum Daratan 7. Meningkatkan Penerapan Teknologi Perikanan 8. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengidentifikasian keanekaragaman di lokasi suaka 2. Peningkatan pembinaan <i>Illegal fishing</i> 3. Pembinaan dan Sosialisasi Undang-undang Perikanan 4. Peningkatan Pembinaan Pokmaswas 5. Pengembangan dan Pelatihan Kaji Terap Teknologi Perikanan 6. Sosialisasi dan pembinaan di kecamatan-kecamatan 7. Peningkatan Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Masyarakat Perikanan Tangkap serta penambahan Sumber Daya Manusia 8. Peningkatan sarana dan Prasarana Perikanan yang ramah Lingkungan 9. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan
--	--	---	---

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan. Kebijakan Umum Urusan Perikanan Kabupaten Musi banyuasin 2017-2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan.
- b. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan.
- c. Meningkatkan lapangan kerja, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh.
- e. Mendorong Investor Sektor Perikanan

C. Program dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2017–2022, telah ditetapkan program yang akan dilaksanakan periode 2017-2022. Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi Pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dan sebagai langkah dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Program utama yang menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan selama 2017-2022 adalah:

- 1. Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**
 - a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
- 2. Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan**
 - a. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya kelautan
 - b. Peningkatan Wasdal Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
- 3. Kegiatan Program Pengembangan Budidaya Perikanan**
 - a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
 - b. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
 - d. Pengelolaan Unit Perikanan
 - e. Pembentukan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
- 4. Kegiatan Program Pengembangan Perikanan Tangkap**
 - a. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan
 - c. Rehabilitasi Sedang / Berat Tempat Pelelangan Ikan
 - d. Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap
 - e. Monitoring Perikanan Tangkap

5. Kegiatan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

- a. Pembinaan dan Pendampingan Kelembagaan Perikanan

6. Kegiatan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan
- b. Pameran Potensi / Promosi
- c. Sosialisasi Gemarikan
- d. Pembinaan Kelompok Pengelola dan Pemasaran Hasil Perikanan

7. Kegiatan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

- a. Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- b. Pengelolaan BBI Lokal Sungai Lilin
- c. Monitoring Perikanan Budidaya
- d. Pengelolaan Hatchery
- e. Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Perikanan
- f. Pengembangan PPI-PUD
- g. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
- h. Pengelolaan Suaka Perikanan
- i. Pengembangan Minapadi

8. Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. Penyediaan peralatan rumah tangga
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makan dan minum
- k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
- m. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

9. Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan rumah dinas
- b. Pembangunan Gedung Kantor
- c. Pengadaan mobil jabatan
- d. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- e. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
- f. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- g. Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas
- h. Pengadaan peralatan gedung kantor
- i. Pengadaan mebeleur
- j. Pengadaan instalasi air, listrik dan telepon
- k. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
- l. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- m. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
- n. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- o. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
- p. rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
- q. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
- r. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional
- s. Pembuatan website OPD
- t. Pengelolaan website OPD

10. Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan mesin / kartu absensi
- b. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- c. Pengadaan pakaian kerja lapangan
- d. Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

11. Kegiatan Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

- a. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

12. Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- b. Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 523/577/Disperik /2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut :

Indikator masing-masing sasaran dan target capaian indikator perencanaan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Sasaran resntra dan indikator kinerja utama

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya ton
		2.	Jumlah Produksi Benih ekor
2.	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan	3.	Jumlah Produk Olahan Perikanan Ton
		4.	Persentase Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun
3.	Meningkatnya Kelestarian Ekosistem Sumberdaya Perikanan	5.	Jumah Produksi Perikanan Tangkap ton

E. Rencana Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap Tahunnya. Rencana Kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Sasaran Strategis Tahun 2018 ditetapkan sebanyak 6 sasaran dengan target indikator sebanyak 9 indikator.

F. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29/2011 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 dan Renja Tahun 2018.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah & Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja**a. Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{kinerja Rencana}} \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, analisa pengukuran capain kinerja juga dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realiasi tahun 2018.
2. Membandingkan realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat tahun 2017 -2022
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian pernyataan kinerja.
7. Realisasi Anggaran

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

X	≥	85 %	:	Baik sekali
70 %	≤	X < 85 %	:	Baik
55 %	<	X < 70 %	:	Cukup
X	≤	55%	:	Kurang

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2018 Dinas Perikanan disusun berdasarkan capaian kinerja setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Capaian kinerja tersebut berasal dari pengukuran kinerja yang merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pencapaian target IKU atas sasaran satu yaitu meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 3. Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	20.861	19.276,07	92,40%
2.	Produksi benih	Ekor	1.815.000	1.399.102	77 %
Rata-rata capaian					84,7%

Pencapaian target IKU atas sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Diversifikasi Produk Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan, dapat dilihat pada tabel 4 :

Tabel 4. Indikator Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Produk Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Jumlah Produk Olahan	Ton	207,96	206	99,05%
2	Persentase Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	34,91	35,24	100,94%
Rata-rata capaian					99,99%

Pencapaian target IKU atas sasaran keenam yaitu Meningkatnya Produksi Ikan, Terjaganya Kelestarian Ikan dan Terjaganya Ekosistem Reservat, dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5. Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Ikan, Terjaganya Kelestarian Ikan dan Terjaganya Ekosistem Reservat

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	22.636,93	23.607,17	104 %
Rata-rata capaian					104%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan Capaian Tahun 2018 Dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi						Capaian%					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13.240,69	16.900,57	17.543,76	18.592,88	19.003,27	19.276,07	107.18	114	97	98,53	100	92.4
2	Jumlah Produksi Benih	Ekor	-	-	314	550	1.915.350	1.399.102	-	-	-	110	127.69	77
3	Jumlah Produk Olahan Perikanan	Ton	19.7	30.7	31.4	32.028	200	206	-	-	-	100	98.09	99.05
4	Persentase Angka Konsumsi Ikan	Kg/Org/Thn	30.72	32.96	36.1	37.9	42.63	35.24	74.11	77.46	82.7	86.13	94.06	100.97
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	19.344	20.117	20.922	21.696,24	22.229,60	23.607,17	96.14	96.16	96.14	99.7	99.47	104

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2022

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target akhir Renstra tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Akhir Renstra 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017-2022 (RPJMD)	Realisasi 2018	Capain 2018 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	20.861	19.276,07	92,40%
2.	Jumlah Produksi Benih	Ekor	1.815.000	1.399.102	77%
3.	Jumlah Produk Olahan Perikanan	Ton	207,96	206	99,05 %
4.	Persentase Angka Konsumsi Ikan	Kg/orang/th	34,91	35,24	100,97 %
5.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	22.636,93	23.607,17	104%

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Rata-rata capaian **Jumlah Produksi Perikanan** pada tahun 2018 adalah 84,7 %. Di dukung oleh capaian indikator :
 - a. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 adalah 19.276,07 ton/tahun dengan capaian 92,40 %. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal, tapi tidak memenuhi target yang dibebankan. Untuk perbandingan dengan tahun 2017 capaian target di tahun 2018 mengalami, begitupun juga bila dibandingkan dengan lima tahun terakhir dari tahun 2012-2017. Hal ini disebabkan dalam rentang waktu lima tahun tersebut terdapat banyaknya bantuan hibah yang diterima oleh kelompok tani yang mengakibatkan terjadinya industrialisasi perikanan dari hulu ke hilir mulai dari produksi hingga penghasilan petani perikanan. Sehingga capaian peningkatan produksi perikanan budidaya terlaksana secara maksimal. Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan sosialisasi baik secara langsung kepada masyarakat kelompok tani perikanan maupun melalui materi seminar dan pertemuan, sehingga animo masyarakat dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya dapat terlaksana secara maksimal.
 - b. Produksi benih BBI Lokal pada tahun 2018 adalah 1.399.102 ekor dengan capaian 77% .Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih belum maksimal, beberapa kendala yang dihadapi dalam hal memproduksi benih di BBI Lokal pada tahun ini yakni perubahan kualitas air saat pemindahan benih dari kolam hatchery ke kolam pendederan sehingga masih banyak yang mati, kesulitan pakan alami untuk larva patin dan lele, sehingga terjadi kanibalisme antar larva, kemarau panjang yang mengakibatkan kematian

masal pada larva dikarenakan suhu yang terlalu tinggi pada media pembesarannya. Serta masih belum maksimalnya produksi benih dikarenakan induk-induk yang baru masih belum dapat dipijahkan secara maksimal, diharapkan ditahun berikutnya produksi dari indukan baru ini dapat lebih maksimal lagi.

2. Rata-rata capaian **Meningkatnya Diversifikasi Produk Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan pada tahun 2018 adalah 99,99% di dukung oleh capaian faktor :**

- a. Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan tahun 2018 adalah 206 ton/tahun, dengan capaian 99,05%. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan optimal Faktor keberhasilan indikator ini antara lain melimpahnya jumlah ikan pada saat musim tertentu di sepanjang Daerah Aliran Sungai Musi (DAS) sehingga tingkat partisipasi masyarakat perikanan dalam meningkatkan produksi hasil pengolahan perikanan juga ikut meningkat.
- b. Capaian **Peningkatan Angka Konsumsi Ikan** pada tahun 2018 adalah 35,24 kg/orang/tahun. dengan capaian 100,94 %. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan optimal dalam mencapai target yang telah dibebankan. Untuk perbandingan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan, tetapi bila dibandingkan dengan lima tahun terakhir tahun 2012-2017 terjadi fluktuasi yang naik turun, kendala yang dihadapi dalam mencapai target peningkatan angka konsumsi ikan ini antara lain masih tingginya harga ikan di daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mengingat pasokan ikan banyak didominasi datang dari daerah luar daerah yang mampu mencapai 50%, sehingga masyarakat berusaha mencari alternatif protein yang lebih murah, selain itu adanya perbedaan persepsi dalam perhitungan angka konsumsi ikan.

3. Capaian **Meningkatnya Produksi Ikan, Terjaganya Kelestarian Ikan dan Terjaganya Ekosistem Perikanan Target Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2018 adalah 23.607,17 ton/tahun. Dengan capaian 104%. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal bahkan melebihi target yang dibebankan yaitu 22.636,69 ton/tahun. Untuk perbandingan dengan tahun 2017 capaian target ditahun 2018 juga mengalami peningkatan. Sama halnya bila dibandingkan dengan capaian pada lima tahun terakhir dari tahun 2012-2017. Hal ini disebabkan dalam rentang waktu empat tahun terakhir terdapat banyaknya bantuan hibah yang diterima oleh nelayan perikanan, sehingga memacu meningkatnya produksi perikanan tangkap.**

D. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis dan efisien penggunaan sumber daya yang dilakukan terhadap setiap sasaran dapat dilihat pada tabel 8 :

Tabel 8. Analisis dan efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap setiap sasaran

No	Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Anggaran Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	97,07	Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar - Pengelolaan BBI Lokal Sungai Lilin - Pengelolaan Hatchery - Monitoring perikanan budidaya	427.000.000 150.000.000 127.000.000 150.000.000	414.507.000 147.135.000 118.906.000 148.466.000	2,93 1,91 1,02 6,37
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	98,17	Program pengembangan perikanan tangkap - Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap - Pengembangan PPI-PUD Sungai Lilin - Monitoring perikanan tangkap	535.000.000 75.000.000 310.000.000 150.000.000	525.212.400 74.014.400 306.460.000 144.738.000	1,83 1,31 1,14 3,51
	1.3 Meningkatkan Produksi Ikan Konsumsi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	91,68	Program Pengembangan Perikanan Budidaya - Pembinaan dan pengembangan perikanan - Pengelolaan Unit Perikanan	3.115.310.000 1.650.000.000 1.465.310.000	2.856.252.500 1.414.348.500 1.441.904.000	8,32 14,38 1,6
2	2.1. Meningkatkan mutu produk hasil perikanan	98,7	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Pembinaan kelompok pengelola dan pemasaran hasil perikanan	275.000.000 275.000.000	271.424.000 271.424.000	1,3 1,3
3	3.1.Peningkatan pemasaran produk hasil perikanan	95,65	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Pameran potensi / promosi	75.000.000 75.000.000	71.734.000 71.734.000	4,35 4,35
4	1.1. Peningkatan konsumsi ikan	96,35	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Sosialisasi gemarikan	232.495.000 232.495.000	224.007.416 224.007.416	3,65 3,65

5	1.1.Meningkatkan kualitas lingkungan perairan	93,74	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	100.000.000	93.736.000	6,26
			- Pengelolaan suaka perikanan	100.000.000	93.736.000	6,26
	1.2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	93,27	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	151.040.000	140.855.000	6,73
			- Peningkatan wasdal pemanfaatan sumberdaya ikan	100.000.000	93.235.000	6,76
			- Pembinaan POKMASWAS	51.040.000	47.620.000	6,7

1. Analisis mengenai sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar, dengan kegiatan monitoring perikanan budidaya dimana terdapat efisiensi sebesar 2,93 % pada kegiatan tersebut. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 17 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 3 orang staf, 1 orang Kepala UPTD BBI , 1 Orang Kasubbag TU BBI, 6 orang tenaga kontrak dan 6 orang tenaga kontrak BBI dan 3 orang penyuluh perikanan bantu.

2. Analisis mengenai sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : program pengembangan perikanan tangkap, dengan kegiatan pengembangan PPI PUD Sungai Lilin, dan monitoring perikanan tangkap, dimana terdapat efisiensi sebesar 1,83%. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 4 orang staf, 4 orang tenaga kontrak dan 3 orang penyuluh perikanan bantu.

3. Analisis mengenai sasaran meningkatkan produksi benih ikan berbasis pemberdayaan masyarakat serta efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar dengan kegiatan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) lokal Sungai Lilin dan kegiatan pengelolaan hatchery, dimana terdapat efisiensi sebesar 2,93 %. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 3 orang staf dan 9 orang tenaga kontrak.

4. Analisis mengenai sasaran meningkatkan mutu produk hasil perikanan serta efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan Kegiatan Pembinaan kelompok pengelola dan pemasaran hasil perikanan , dimana terdapat efisiensi sebesar 1,3 %. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 3 orang staf, dan 5 orang tenaga kontrak.

5. Analisis mengenai sasaran peningkatan pemasaran produk hasil perikanan serta efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan Pameran Potensi/Promosi, dimana terdapat efisiensi sebesar 4,35 %. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 3 orang staf, dan 5 orang tenaga kontrak.

6. Analisis mengenai sasaran peningkatan konsumsi ikan serta efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan sosialisasi gemarikan, dimana terdapat efisiensi sebesar 3,65 %. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 3 orang staf, dan 5 orang tenaga kontrak.

7. Analisis mengenai sasaran meningkatkan kualitas lingkungan perairan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan suaka perikanan, dimana terdapat efisiensi sebesar 6,26 %. Adapun penggunaan sumberdaya manusia pada kegiatan ini sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 1 orang staf, dan 5 orang tenaga kontrak.

E. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian kinerja

Keberhasilan capaian kinerja sasaran seperti yang dijelaskan diatas antara lain di dukung oleh :

1. Semakin meningkatnya SDM Perikanan dengan semakin tingginya kesadaran yang dimiliki oleh aparatur untuk meningkatkan kapasitasnya baik melalui pendidikan formal maupun non formal.
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.
3. Kedudukan organisasi dan tugas pokok Dinas Perikanan yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perikanan.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang walaupun pencapaiannya sudah baik tetapi perlu ditingkatkan lagi antara lain yaitu :

1. Masih belum optimalnya koordinasi antar sub unit dalam organisasi dan antara organisasi dengan SKPD terkait.
2. Sistem informasi (basis data) yang dimiliki belum maksimal dan efektif

3. Pengawasan dan monitoring terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan (*follow up*) yang masih lemah.

F. Realisasi Anggaran

Dasar penyusunan anggaran kegiatan Pemerintah Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut Belanja Daerah terbagi dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kab. Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 9 :

Tabel 9. Akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kab. Musi Banyuasin

Sasaran	Program	Realisasi	Persentasi Capaian
1	2	3	4
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	Belanja Tidak Langsung: 1. Gaji dan Tunjangan 2. Tambahan Penghasilan PNS	2.289.881.577,- 944.943.450,-	95,94% 97,31%
Terlaksananya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal	Belanja Langsung: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal	3.927.723.027,- 6.103.033.046,- 484.536.000,-	95,61% 90,46% 98%

Secara umum Sasaran serta Program **Belanja Tidak Langsung** Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2018 terlaksana dengan baik dengan persentasi capaian untuk Gaji dan Tunjangan capaiannya 95,94% dan Tambahan Penghasilan PNS 97,31%, sedangkan Sasaran serta Program **Belanja Langsung** juga terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tabel diatas dimana Belanja Pegawai mempunyai realisasi capaian 95,61 % untuk Belanja Barang dan Jasa realisasinya 90,46 % Pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin itu sendiri. Untuk Belanja Modal dengan realiasinya 98%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Media ini sangat penting untuk dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tergolong **Baik**. keberhasilan program pembangunan bidang Perikanan sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik.

LKjIP yang telah disusun ini hendaknya mampu sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat publik khususnya Pejabat di lingkungan Dinas Perikanan, oleh karenanya LKjIP ini diharapkan secara terus menerus mendorong perbaikan proses manajemen dan kompetensi aparat di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam pelaksanaannya seluruh Program/Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin selama Tahun Anggaran 2018 cukup berjalan mulus sebagaimana mestinya, memang ada beberapa hambatan tetapi lebih kepada ruang gerak dari Dinas Perikanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Produksi dan Penyuluhan Perikanan, serta Bidang Sumberdaya Perikanan.

Diharapkan ke depan Dinas Perikanan mendapat perhatian khusus dari Pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya dari Bappeda dan BPKAD kiranya dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas agar Visi dari Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan untuk mendukung tercapainya **Masyarakat Perikanan Tangguh 2022**.

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Musi Banyuasin,**



**H. Abdul Mukohir, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640410 198903 1 008**